

3 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupundilihat dari efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2014 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari struktur pendapatan tersebut dapat dibedakan per komponen pendapatan yang telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap sumber penerimaan baru, akan tetapi lebih mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dan Tarif yang diatur didalamnya terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Penerapan Samsat Keliling, di mana Samsat Keliling ini adalah bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh petugas Samsat di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota untuk mendekati Wajib Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
- 3) Pembentukan Pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, pada Tahun 2011 telah dibangun 4 (empat) pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yakni:
 - a) Pos Pelayanan di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
 - b) Pos Pelayanan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi
 - c) Pos Pelayanan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
 - d) Pos Pelayanan di Kecamatan Tempino Kabupaten Muaro Jambi
- 4) Pelaksanaan Pajak Progresif, yang bertujuan untuk:
 - a) Menjaring Bea Balik Nama bagi pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu (BBN-II).
 - b) Meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Perhitungan besaran jumlah pajak yang terutang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Pajak Progresif ini mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2011.

- 5) Razia rutin kendaraan bermotor, kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendapatan Provinsi Jambi bekerjasama dengan kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-II. Dalam pelaksanaannya Tim menjangking pemilik kendaraan yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kendaraan dengan nomor polisi luar Provinsi Jambi yang beroperasi di Provinsi Jambi.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Selama tahun 2014 pendapatan daerah memperlihatkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan dengan capaian realisasi sebesar 102,57 persen atau sejumlah Rp3.207.457.261.373,68 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3.127.131.786.586,67. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi meningkat sebesar 11,13 persen atau Rp321.194.355.237,58.

Pelampauan target pendapatan pada tahun 2014 tersebut, terdapat pada pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar Rp114.804.679.739,01 atau melebihi target sebesar 9,50 persen, di mana terealisasi sebesar Rp1.323.642.664.246,68 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.208.837.984.507,67. Pendapatan yang sumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah juga terjadi pelampauan sebesar Rp7.190.654.119,00 atau 1,99 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp362.105.554.000,00. Untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan hanya mencapai Rp1.514.518.389.008,00 atau 97,32 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.556.188.248.079,00, namun jumlah tersebut masih melebihi realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.958.525.692,00 atau 1,81 persen.

Dari realisasi pendapatan pada tahun 2014, Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 41,27 persen dari total

pendapatan, Dana Perimbangan dengan kontribusi pendapatan sebesar 47,22 persen dan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 11,51 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2014

No	PENDAPATAN	2013	2014*)	+/- (%)
1	<i>PAD</i>			
	Target	902.554.697.570,26	1.208.837.984.507,67	33,94
	Realisasi	1.063.879.903.502,10	1.323.642.664.246,68	24,42
	Lebih (kurang)	161.325.205.931,84	114.804.679.739,01	
	Realisasi (%)	117,87	109,50	
2	<i>Dana</i>			
	Target	1.385.829.989.856,10	1.556.188.248.079,00	12,29
	Realisasi	1.487.559.863.316,00	1.514.518.389.008,00	1,81
	Lebih (kurang)	101.729.873.459,90	(41.669.859.071,00)	
	Realisasi (%)	107,34	97,32	
3	<i>Penerimaan Lain</i>			
	Target	339.994.410.000,00	362.105.554.000,00	6,50
	Realisasi	334.823.139.318,00	369.296.208.119,00	10,30
	Lebih (kurang)	(5.171.270.682,00)	7.190.654.119,00	
	Realisasi (%)	98,48	101,99	
Jumlah Pendapatan				
	Target	2.628.379.097.426,36	3.127.131.786.586,67	18,98
	Realisasi	2.886.262.906.136,10	3.207.457.261.373,68	11,13
	Realisasi (%)	109,81	102,57	

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi
Ket : *) data sementara, 31 Januari 2015

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah Daerah

Secara umum pendapatan pajak daerah sangat mempengaruhi terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 76,35 persen dan untuk tahun 2014 pendapatan pajak daerah terealisasi Rp1.010.560.585.181,00, atau 98,89 persen, jumlah tersebut tidak mencapai dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.021.867.910.000,00, akan tetapi mengalami peningkatan sebesar 20,04 persen dari realisasi tahun 2013 atau meningkat sebesar Rp168.675.833.981. Selanjutnya secara berurutan PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 19,99 persen dari total PAD, adapun realisasi dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp264.583.252.277,18 atau melebihi target sebesar

106,52 persen, jumlah tersebut juga melebihi dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp84.830.887.233,09 atau 47,19 persen.

Sedangkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 2,56 persen atau sebesar Rp33.911.646.236,00, jumlah tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar Rp43.199.037.500,00 atau hanya terealisasi sebesar 78,50 persen, tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terutama pada Bank Jambi tidak memenuhi target sebesar Rp39.420.000.000,00 atau hanya terealisasi sebesar 75,76 persen atau sejumlah Rp29.864.450.245,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Pada Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa, secara total terjadi peningkatan PAD dari tahun sebelumnya. Realisasi PAD pada tahun 2014 meningkat sebesar 24,42 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013.

Sedangkan untuk Pajak Daerah hanya mencapai 98,89 persen atau Rp1.010.560.585.181,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.021.867.910.000,00. Dari 5 komponen penyumbang pendapatan pajak, ada 2 sumber penerimaan yang tidak mencapai target yaitu BBN-KB dan Pajak Rokok. Untuk BBN-KB hanya tercapai sebesar Rp316.823.957.130,00 atau 98,54 persen dari target sebesar Rp321.510.460.000,00. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM sehingga pembelian kendaraan baru mengalami penurunan dari prediksi semula. Sedangkan untuk Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar 80,26 persen dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pajak rokok sifatnya sama dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga daerahnya sifatnya hanya menunggu besaran dana yang ditransfer sesuai dengan Penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Pajak Rokok bagi Daerah (Pemerintah Provinsi Jambi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013-2014

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1	Pendapatan Pajak Daerah			
	Target	762,437,579,667.00	1,021,867,910,000.00	34.03
	Realisasi	841,884,751,200.00	1,010,560,585,180.50	20.04
	Realisasi (%)	110.42	98.89	
2	Hasil Retribusi Daerah			
	Target	15,146,578,500.00	15,655,630,315.00	3.36
	Realisasi	15,363,758,638.00	14,587,180,553.00	(5.05)
	Realisasi (%)	101.43	93.18	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Target	28,715,827,350.00	43,199,037,500.00	50.44
	Realisasi	26,879,028,620.01	33,911,646,236.00	26.16
	Realisasi (%)	93.60	78.50	
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Target	96,254,712,053.26	128,115,406,692.67	33.10
	Realisasi	179,752,365,044.09	264,583,252,277.18	47.19
	Realisasi (%)	186.75	206.52	
	Jumlah PAD			
	Target	902,554,697,570	1,208,837,984,508	33.94
	Realisasi	1,063,879,903,502	1,323,642,664,247	24.42
	Realisasi (%)	117.87	109.50	-

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Tabel 3.3
Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013-2014

No	PAJAK	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*)	
1	Kendaraan Bermotor			
	Target	277.383.562.000,00	318.330.750.000,00	14,76
	Realisasi	299.115.576.871,00	318.466.618.198,00	6,47
	Realisasi (%)	107,83	100,04	
2	BBN Kendaraan Bermotor			
	Target	294.578.642.000,00	321.510.460.000,00	9,14
	Realisasi	301.258.119.575,00	316.823.957.130,00	5,17
	Realisasi (%)	102,27	98,54	
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
	Target	189.550.300.000,00	258.497.200.000,00	36,37
	Realisasi	240.371.585.823,00	275.881.206.722,50	14,77
	Realisasi (%)	126,81	106,73	
4	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan			
	Target	925.075.667,00	1.187.500.000,00	28,37
	Realisasi	1.139.468.931,00	1.191.753.673,00	4,59
	Realisasi (%)	123,18	100,36	
5	Pajak Rokok			
	Target	-	122.342.000.000,00	-
	Realisasi	-	98.197.049.457,00	-
	Realisasi (%)	-	80,26	
Jumlah Pajak Daerah				
	Target	762.437.579.667	1.021.867.910.000	34,03
	Realisasi	841.884.751.200	1.010.560.585.181	20,04
	Realisasi (%)	110,42	98,89	

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi

Ket : *) data sementara, 31 Januari 2015

Tabel 3.4
Perkembangan Hasil Retribusi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013-2014

No	HASIL RETRIBUSI DAERAH	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1	Retribusi Jasa Umum			
	Target	4,132,200,000.00	2,159,940,000.00	(47.73)
	Realisasi	3,636,673,300.00	1,933,255,250.00	(46.84)
	Realisasi (%)	88.01	89.51	
2	Retribusi Jasa Usaha			
	Target	9,358,978,500.00	12,280,210,315.00	31.21
	Realisasi	9,645,330,988.00	11,374,728,353.00	17.93
	Realisasi (%)	103.06	92.63	
3	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	Target	1,655,400,000.00	1,215,480,000.00	(26.57)
	Realisasi	2,081,754,350.00	1,262,326,950.00	(39.36)
	Realisasi (%)	125.76	103.85	
4	Retribusi Perizinan Tertentu			
	Target		0.00	
	Realisasi		16,870,000.00	
	Realisasi (%)			
	Hasil Retribusi Daerah			
	Target	15,146,578,500.00	15,655,630,315.00	3.36
	Realisasi	15,363,758,638.00	14,587,180,553.00	(5.05)
	Realisasi (%)	101.43	93.18	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi
Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari
2015

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba milik daerah/BUMD dan milik Swasta sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2013-2014

No	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
	Target	28,156,827,350.00	39,420,000,000.00	40.00
	Realisasi	25,458,447,379.01	29,864,450,245.00	17.31
	Realisasi (%)	90.42	75.76	
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
	Target	559,000,000.00	3,779,037,500.00	576.04
	Realisasi	559,884,964.00	3,781,208,888.00	575.35
	Realisasi (%)	100.16	100.06	
3	Bagian Laba Penyertaan pada PT. Simota			
	Target	0.00	0.00	
	Realisasi	860,696,277.00	265,987,103.00	(69.10)
	Realisasi (%)			
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Target	28,715,827,350.00	43,199,037,500.00	50.44
	Realisasi	26,879,028,620.01	33,911,646,236.00	26.16
	Realisasi (%)	93.60	78.50	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Berdasarkan tabel di atas, untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan realisasinya hanya mencapai 78,50 persen atau sebesar Rp.33.911.646.236,00 dari target sebesar Rp.43.199.037.500,00, akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, terjadi peningkatan 26,16 persen atau sebesar Rp7.032.617.615,99,00.

Penerimaan dari jenis Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari 11 komponen penerimaan dan hampir semua komponen mencapai realisasi yang melebihi target, hanya dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yang tidak mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perkembangan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2013-2014

No	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan			
	Target	0.00	5,600,000,000.00	
	Realisasi	564,714,140.00	523,483,731.00	(7.30)
	Realisasi (%)		9.35	
2	Penerimaan Jasa Giro			
	Target	2,021,707,650.00	2,021,707,650.00	-
	Realisasi	4,488,431,279.78	4,694,221,933.23	4.58
	Realisasi (%)	222.01	232.19	
3	Penerimaan Bunga Deposito			
	Target	25,500,000,000.00	25,500,000,000.00	-
	Realisasi	49,218,656,482.37	59,632,449,896.82	21.16
	Realisasi (%)	193.01	233.85	
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)			
	Target	0.00	0.00	
	Realisasi	26,933,000.00	19,499,000.00	(27.60)
	Realisasi (%)			
5	Pendapatan Denda Pajak			
	Target	0.00	0.00	
	Realisasi	22,241,083,948.00	24,036,360,030.00	8.07
	Realisasi (%)			
6	Pendapatan Denda Retribusi			
	Target	0.00	0.00	
	Realisasi	1,583,100.00		(100.00)
	Realisasi (%)			
7	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
	Target	1,569,700,000.00	1,569,700,000.00	-
	Realisasi	1,653,905,723.60	1,688,449,069.04	2.09
	Realisasi (%)	105.36	107.57	
8	Penerimaan Lain-lain			
	Target	38,500,000.00	38,500,000.00	-
	Realisasi	17,379,950,222.78	51,956,337,065.31	198.94
	Realisasi (%)	45,142.73	134,951.52	
9	Pendapatan BLUD			
	Target	67,124,804,403.26	93,385,499,042.67	39.12
	Realisasi	82,956,757,147.56	120,870,451,551.78	45.70
	Realisasi (%)	123.59	129.43	
10	Pendapatan Atas Kompensasi Kelebihan Muatan			
	Target	0.00	0.00	
	Realisasi	1,220,350,000.00	1,162,000,000.00	(4.78)
	Realisasi (%)			
11	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Target	96,254,712,053.26	128,115,406,692.67	33.10
	Realisasi	179,752,365,044.09	264,583,252,277.18	47.19
	Realisasi (%)	186.75	206.52	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi
Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari
2015

3.1.2.2 Dana Perimbangan

Selama tahun 2014 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp1.514.518.389.008,00 atau mencapai 97,32 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.556.188.248.079,00. Dari empat sumber pendapatan dana perimbangan tersebut, pendapatan yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 84,88 persen atau sebesar Rp321.853.078.640,00 dari target sebesar Rp379.198.846.296,00. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, penerimaan dari dana perimbangan ini meningkat sebesar 1,81 persen atau Rp26.958.525.692,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Perkembangan Dana Perimbangan Periode 2013-2014

No	DANA PERIMBANGAN	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1	Dana Bagi Hasil Pajak			
	Target	218,994,433,843.00	179,296,179,783.00	(18.13)
	Realisasi	256,649,840,043.00	194,972,088,368.00	(24.03)
	Realisasi (%)	117.19	108.74	
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak			
	Target	279,221,704,013.10	379,198,846,296.00	35.81
	Realisasi	343,296,171,273.00	321,853,078,640.00	(6.25)
	Realisasi (%)	122.95	84.88	
3	Dana Alokasi Umum			
	Target	836,578,062,000.00	948,337,712,000.00	13.36
	Realisasi	836,578,062,000.00	948,337,712,000.00	13.36
	Realisasi (%)	100.00	100.00	
4	Dana Alokasi Khusus			
	Target	51,035,790,000.00	49,355,510,000.00	(3.29)
	Realisasi	51,035,790,000.00	49,355,510,000.00	(3.29)
	Realisasi (%)	100.00	100.00	
Jumlah Dana Perimbangan				
	Target	1,385,829,989,856	1,556,188,248,079	12.29
	Realisasi	1,487,559,863,316	1,514,518,389,008	1.81
	Realisasi (%)	107.34	97.32	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket. : *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa dana alokasi umum memberikan porsi tertinggi dari penerimaan dana perimbangan Provinsi Jambi, yaitu sebesar 62,62

persen, dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 34,12 persen dan dana alokasi khusus sebesar 3,26 persen. Tabel 3.7 tersebut juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerimaan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013, hanya DAU yang mengalami peningkatan sebesar 13,36 persen.

3.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2014 penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp369.296.208.119,00 atau 101,99 persen dari target yang telah ditetapkan dan meningkat 10,30 persen atau sebesar Rp34.473.068.801,00 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2013-2014

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1	Pendapatan Hibah			
	Target	1,000,000,000	1,000,000,000	-A
	Realisasi	8,327,693,318	1,389,273,119	(83.32)
	Realisasi (%)	832.77	138.93	
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	Target	338,994,410,000	361,105,554,000	6.52
	Realisasi	326,495,446,000	367,906,935,000	12.68
	Realisasi (%)	96.31	101.88	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Target	339,994,410,000	362,105,554,000	6.50
	Realisasi	334,823,139,318	369,296,208,119	10.30
	Realisasi (%)	98.48	101.99	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa dana alokasi umum memberikan porsi tertinggi dari penerimaan dana perimbangan Provinsi Jambi, yaitu sebesar 62,62 persen, dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 34,12 persen dan dana alokasi khusus sebesar 3,26 persen. Selanjutnya Tabel 3.7 tersebut juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerimaan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013, hanya DAU yang mengalami peningkatan sebesar 13,36 persen.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, English (Australia)

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok utang.

Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2013 diperoleh dari SiLPA tahun lalu (Tahun Anggaran 2012) sebesar Rp690.767.077.096,83 dan untuk tahun 2014 (data sementara), penerimaan pembiayaan sebesar Rp514.103.467.111,39. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Perkembangan Pembiayaan Periode 2013-2014

URAIAN	2013		2014*)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SURPLUS/(DEFISIT)	(640.142.989.536,83)	(126.099.522.425,44)	(514.103.467.111,39)	(4.921.275.985,83)
PEMBIAYAAN DAERAH	640.142.989.536,83	640.202.989.536,83	514.103.467.111,39	514.103.467.111,39
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	690.767.077.096,83	690.767.077.096,83	514.103.467.111,39	514.103.467.111,39
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	690.191.391.521,56	690.767.077.096,83	514.103.467.111,39	514.103.467.111,39
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	575.685.575,27	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.624.087.560,00	50.564.087.560,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	50.190.000.000,00	50.130.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	434.087.560,00	434.087.560,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan				
PEMBIAYAAN NETTO	640.142.989.536,83	640.202.989.536,83	514.103.467.111,39	514.103.467.111,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	514.103.467.111,39	0,00	509.182.191.125,56

Sumber: BPKAD Provinsi Jambi

Ket : *) data sementara, 31 Januari 2015

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa untuk kurun waktu Tahun 2014 terdapat defisit pada APBD Provinsi Jambi sebesar Rp4.921.275.985,83 yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan Rp3.207.457.261.373,68 dengan

realisasi belanja daerah sebesar Rp3.212.378.537.359,51. Jumlah defisit tersebut ditutupi oleh pembiayaan netto. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan, untuk tahun 2014 pembiayaan netto tercatat Rp514.103.467.111,39. Selanjutnya untuk tahun 2014 terdapat SilPA tahun berkenaan sebesar Rp509.182.191.125,56 (angka sementara), SilPA tersebut merupakan selisih atas penjumlahan surplus/(defisit) dengan pembiayaan netto.

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dengan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.2 Alokasi dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi Jambi dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Pada tahun 2014 untuk anggaran belanja dialokasikan sebesar ~~Rp3~~[Rp.3.641.235.253.698,06](#) dengan

rincian alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar ~~Rp1~~Rp.1.664.278.849.417,26 atau setara dengan 45,71 persen ~~dari total target belanja~~, sedangkan untuk Alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar ~~Rp1~~Rp.1.976.956.404.280,80 atau setara dengan 54,29Rp3Rp.3.212.378.537.359,51, terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp1.488.053.977.175,00 setara dengan 89,1441 persen dari target anggaran dan untuk Belanja Langsung terealisasi Rp1Rp.1.724.324.560.184,51 atau setara dengan 87,7722 persen ~~dari target anggaran~~.

Selanjutnya jika dibandingkan realisasi belanja daerah tahun sebelumnya terjadi penurunan, secara persentase yaitu dari 92,16 persen di tahun 2013 menjadi 88,22 persen di tahun 2014, namun secara nominal terjadi peningkatan serapan belanja daerah sebesar 6,64 persen atau sejumlah ~~Rp200~~Rp.200.016.108.797,97 dari tahun lalu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2014

No	BELANJA DAERAH	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1	Belanja Tidak Langsung			
	Target	1,352,929,532,921.93	1,664,278,849,417	23.01
	Realisasi	1,271,999,481,185.30	1,488,053,977,175	16.99
	Realisasi (%)	94.02	89.41	
2	Belanja Langsung			
	Target	1,915,592,554,041.26	1,976,956,404,281	3.20
	Realisasi	1,740,362,947,376.24	1,724,324,560,185	(0.92)
	Realisasi (%)	90.85	87.22	
Jumlah Belanja Daerah				
	Target	3,268,522,086,963	3,641,235,253,698	11.40
	Realisasi	3,012,362,428,562	3,212,378,537,360	6.64
	Realisasi (%)	92.16	88.22	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 dapat dibedakan menjadi 2 urusan yaitu Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, untuk urusan wajib dialokasikan sebesar ~~Rp3~~Rp.3.383.153.770.539,05 atau 92,91 persen sedangkan

urusan pilihan dianggarkan sebesar Rp258.081.483.159,01 atau 7,09 persen dari jumlah belanja daerah. Penyerapan anggaran urusan wajib terealisasi sebesar 92,6487,97 persen atau sejumlah Rp2Rp.2.976.058.581.166,51, jumlah tersebut lebih besar 7,00 persen dari tahun 2013. Sedangkan untuk urusan pilihan terealisasi Rp236Rp.236.319.956.193,00 atau 91,57 persen dari anggaran yang ditetapkan, namun jumlah tersebut masih lebih besar 2,32 persen penyerapannya dari tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2014 menurut urusan

No	BELANJA DAERAH URUSAN	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014*	
1		Belanja Urusan Wajib		
	Target	3,010,465,078,893.19	3,383,153,770,539.05	12.38
	Realisasi	2,781,392,381,600.54	2,976,058,581,166.51	7.00
	Realisasi (%)	92.39	87.97	
2		Belanja Urusan Pilihan		
	Target	258,057,008,070.00	258,081,483,159.01	0.01
	Realisasi	230,970,232,451.00	236,319,956,193.00	2.32
	Realisasi (%)	89.50	91.57	
		Jumlah Belanja Daerah		
	Target	3,268,522,086,963.19	3,641,235,253,698.06	11.40
	Realisasi	3,012,362,614,051.54	3,212,378,537,359.51	6.64
	Realisasi (%)	92.16	88.22	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Untuk belanja tidak langsung, realisasi terbesar adalah untuk belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp462,356,647,416.00 dan diikuti untuk belanja pegawai dan hibah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja
Tahun 2013 - 2014

No	URAIAN	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014	
1.	Belanja Pegawai			
	Target	481,962,867,921.93	546,668,606,469.21	13.43
	Realisasi	434,864,501,003.00	480,284,209,419.00	10.44
	Realisasi (%)	90.23	87.86	
2	Belanja Hibah			
	Target	356,866,890,000.00	413,679,439,425.00	15.92
	Realisasi	335,724,011,000.00	385,132,089,900.00	14.72
	Realisasi (%)	94.08	93.10	
3	Belanja Bantuan Sosial			
	Target	37,915,800,000.00	25,502,000,000.00	(32.74)
	Realisasi	33,441,016,680.00	19,869,750,000.00	(40.58)
	Realisasi (%)	88.20	77.91	
4	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa			
	Target	315,958,975,000.00	521,357,996,861.00	65.01
	Realisasi	315,495,683,322.00	462,356,647,416.00	46.55
	Realisasi (%)	99.85	88.68	
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa			
	Target	157,225,000,000.00	155,070,806,662.05	(1.37)
	Realisasi	150,386,797,280.30	138,550,780,440.00	(7.87)
	Realisasi (%)	95.65	89.35	
6	Belanja Tidak Terduga			
	Target	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	(33.33)
	Realisasi	2,087,471,900.00	1,860,500,000.00	(10.87)
	Realisasi (%)	69.58	93.03	
Jumlah Belanja Tidak Langsung				
	Target	1,352,929,532,921.93	1,664,278,849,417.26	23.01
	Realisasi	1,271,999,481,185.30	1,488,053,977,175.00	16.99
	Realisasi (%)	94.02	89.41	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Sedangkan untuk belanja langsung pada tahun 2014, realisasi terbesar adalah belanja modal, diikuti oleh belanja barang dan jasa dan belanja pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.13.

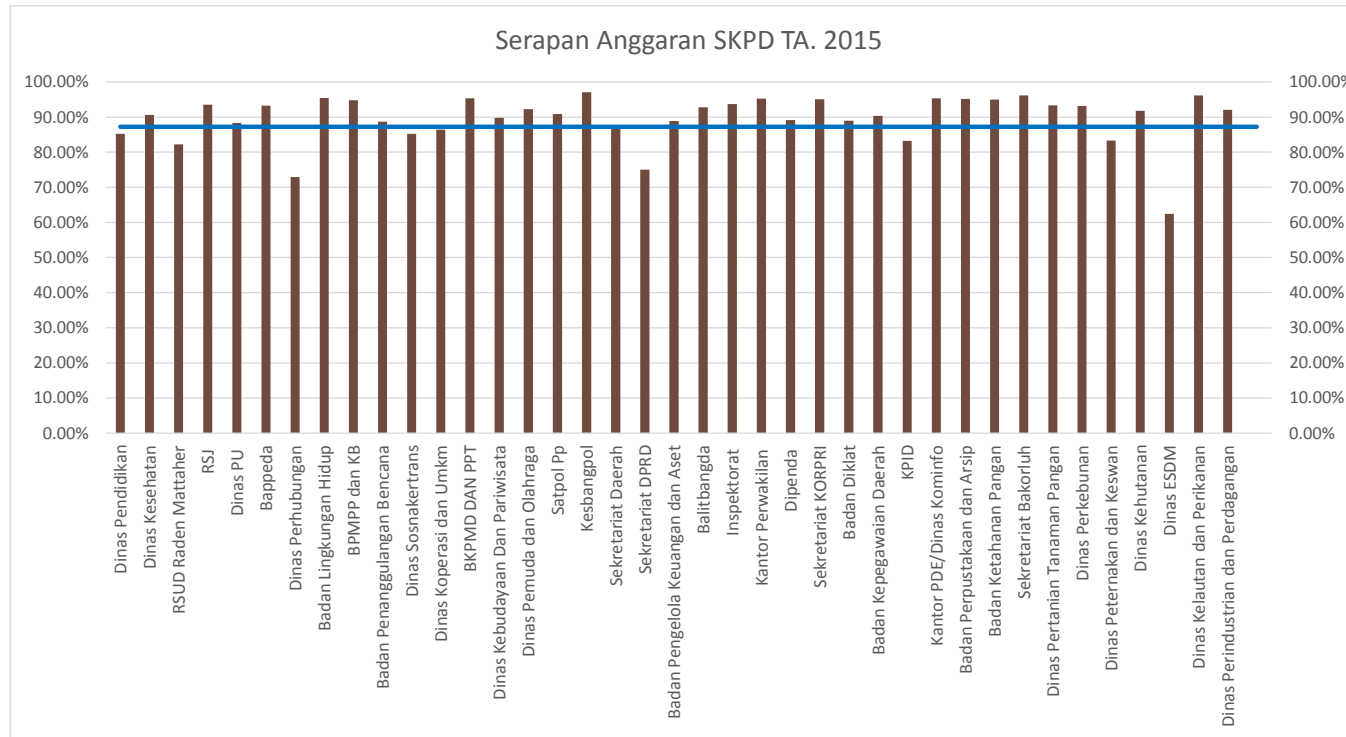
Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung menurut Jenis Belanja
Tahun 2013 - 2014

No	Uraian	Target/Realisasi		+/- (%)
		2013	2014	
1.	Belanja Pegawai			
	Target	112,308,601,267	110,989,106,881	(1.17)
	Realisasi	98,336,655,113	90,004,993,272	(8.47)
	Realisasi (%)	87.56	81.09	
2.	Belanja Barang dan Jasa			
	Target	773,795,337,335	946,667,746,830	22.34
	Realisasi	703,123,231,097	813,303,968,502	15.67
	Realisasi (%)	90.87	85.91	
3.	Belanja Modal			
	Target	1,029,488,615,439	919,299,550,569	(10.70)
	Realisasi	938,903,061,166	821,015,598,410	(12.56)
	Realisasi (%)	91.20	89.31	
Jumlah Belanja Langsung				
	Target	1,915,592,554,041	1,976,956,404,281	3.20
	Realisasi	1,740,362,947,376	1,724,324,560,185	(0.92)
	Realisasi (%)	90.85	87.22	

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2014 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.13 diketahui bahwa rata-rata realisasi belanja sebesar 87,22 persen, adapun unit kerja dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu pada Badan Kesbangpol yang mencapai 97,09 persen sedangkan realisasi terendah yaitu sebesar 62,43 persen pada Dinas ESDM.



Sumber: BPKAD. Provinsi Jambi (Data Diolah)

Gambar 3.1
Grafik Realisasi Pelaksanaan Anggaran Urusan Wajib Tahun 2014

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat 10 SKPD yang tingkat realisasinya berada di bawah rata-rata atau dengan tingkat realisasi di bawah 87,22 persen. Untuk lebih lengkapnya realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SKPD Tahun 2014

No	SKPD	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	Dinas Pendidikan	213,528,807,348	182,055,751,387	(31,473,055,961)	85.26
2	Dinas Kesehatan	28,077,105,655	25,437,092,635	(2,640,013,020)	90.60
3	RSUD Raden Mattaher	244,364,150,376	200,896,306,964	(43,467,843,412)	82.21
4	RSJ Provinsi Jambi	36,418,009,333	34,065,424,599	(2,352,584,733)	93.54
5	Dinas PU Provinsi Jambi	820,775,200,555	725,270,782,667	(95,504,417,888)	88.36
6	Bappeda	12,258,543,977	11,434,249,452	(824,294,525)	93.28
7	Dinas Perhubungan	43,919,249,000	32,045,668,989	(11,873,580,011)	72.96
8	Badan Lingkungan Hidup	9,458,789,200	9,030,420,206	(428,368,994)	95.47
9	BPMPP dan KB	10,395,989,600	9,852,609,094	(543,380,506)	94.77
10	Badan Penanggulangan Bencana	4,236,088,661	3,756,049,338	(480,039,323)	88.67
11	Dinas Sosnakertrans	25,781,000,000	21,967,717,843	(3,813,282,157)	85.21
12	Dinas Koperasi dan UMKM	12,492,925,350	10,795,771,323	(1,697,154,027)	86.42
13	BKPM dan PPT	5,320,565,000	5,071,574,010	(248,990,990)	95.32
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19,853,637,900	17,826,807,785	(2,026,830,115)	89.79
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	25,119,855,464	23,173,936,618	(1,945,918,846)	92.25
16	Satpol PP	9,316,275,000	8,466,668,443	(849,606,557)	90.88
17	Kesbangpol	8,681,001,000	8,428,609,010	(252,391,990)	97.09
18	DPRD Provinsi Jambi	-	-	-	-
19	Kepala Daerah dan Wakil KDH	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	95,155,728,600	82,710,805,908	(12,444,922,692)	86.92
21	Sekretariat DPRD	48,000,000,000	35,989,136,455	(12,010,863,545)	74.98
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	23,921,659,150	21,259,748,854	(2,661,910,296)	88.87
23	Balitbangda	5,223,971,093	4,848,121,407	(375,849,686)	92.81
24	Inspektorat Provinsi Jambi	12,084,828,000	11,324,825,134	(760,002,866)	93.71
25	Kantor Perwakilan Provinsi Jambi	11,400,000,000	10,856,438,381	(543,561,619)	95.23
26	Dipenda Provinsi Jambi	18,895,837,750	16,842,068,856	(2,053,768,894)	89.13
27	Sekretariat Korpri	3,273,211,870	3,112,647,242	(160,564,628)	95.09
28	Biro Keuangan dan Aset (SKPKD)	-	-	-	-

No	SKPD	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
29	Badan Diklat	12,165,509,660	10,819,813,920	(1,345,695,740)	88.94
30	Badan Kepegawaian Daerah	4,684,114,000	4,233,623,758	(450,490,242)	90.38
31	Kpid	3,659,000,000	3,044,896,632	(614,103,368)	83.22
32	Kantor Pde/Dinas Kominfo	11,852,864,000	11,302,035,114	(550,828,886)	95.35
33	Badan Perpustakaan dan Arsip	8,984,314,062	8,550,103,047	(434,211,015)	95.17
34	Badan Ketahanan Pangan	5,787,375,000	5,495,910,612	(291,464,388)	94.96
35	Bakorluh/Sekretariat Bakorluh	6,372,146,250	6,127,862,964	(244,283,286)	96.17
36	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	27,726,306,877	25,882,195,946	(1,844,110,931)	93.35
37	Dinas Perkebunan	46,317,385,604	43,163,675,370	(3,153,710,234)	93.19
38	Dinas Peternakan dan Keswan	29,988,224,727	24,988,099,075	(5,000,125,652)	83.33
39	Dinas Kehutanan	12,082,404,600	11,086,869,234	(995,535,366)	91.76
40	Dinas ESDM	10,396,276,750	6,490,504,950	(3,905,771,800)	62.43
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	37,214,837,370	35,778,884,149	(1,435,953,221)	96.14
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11,773,215,500	10,840,852,814	(932,362,686)	92.08
	Jumlah Belanja	1,976,956,404,281	1,724,324,560,185	(252,631,844,096)	87.22

Sumber: BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015

Dari total anggaran belanja langsung sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 3.14 tersebut, secara total realisasi anggaran terealisasi sebesar Rp1.724.324.560.185 atau setara dengan 87,22 persen. Sedangkan secara keseluruhan, baik belanja tidak langsung dan belanja langsung menurut kelompok belanja per SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Menurut SKPD per Jenis Belanja Tahun 2014

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	DINAS PENDIDIKAN	237,139,213,409	204,977,496,431	32,161,716,978	86.44
	Belanja Tidak Langsung	23,610,406,061	22,921,745,044	688,661,017	97.08
	Belanja Pegawai	23,610,406,061	22,921,745,044	688,661,017	97.08
	Belanja Langsung	213,528,807,348	182,055,751,387	31,473,055,961	85.26
	Belanja Pegawai	11,023,714,000	9,727,542,000	1,296,172,000	88.24
	Belanja Barang dan Jasa	171,362,866,970	143,930,691,391	27,432,175,579	83.99
	Belanja Modal	31,142,226,378	28,397,517,996	2,744,708,382	91.19

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2	DINAS KESEHATAN	56,283,682,766	51,164,094,868	5,119,587,898	90.90
	Belanja Tidak Langsung	28,206,577,111	25,727,002,233	2,479,574,878	91.21
	Belanja Pegawai	28,206,577,111	25,727,002,233	2,479,574,878	91.21
	Belanja Langsung	28,077,105,655	25,437,092,635	2,640,013,020	90.60
	Belanja Pegawai	2,579,958,621	2,139,081,340	440,877,281	82.91
	Belanja Barang dan Jasa	20,870,709,268	19,027,364,298	1,843,344,970	91.17
	Belanja Modal	4,626,437,765	4,270,646,996	355,790,769	92.31
3	RSUD RADEN MATTAHER	314,195,914,688	264,513,140,009	49,682,774,679	84.19
	Belanja Tidak Langsung	69,831,764,312	63,616,833,045	6,214,931,267	91.10
	Belanja Pegawai	69,831,764,312	63,616,833,045	6,214,931,267	91.10
	Belanja Langsung	244,364,150,376	200,896,306,964	43,467,843,412	82.21
	Belanja Pegawai	44,806,165,560	29,750,013,432	15,056,152,128	66.40
	Belanja Barang dan Jasa	97,613,597,217	83,274,266,051	14,339,331,166	85.31
	Belanja Modal	101,944,387,599	87,872,027,481	14,072,360,118	86.20
4	RSJ PROVINSI JAMBI	54,202,435,029	51,381,477,229	2,820,957,799	94.80
	Belanja Tidak Langsung	17,784,425,696	17,316,052,630	468,373,066	97.37
	Belanja Pegawai	17,784,425,696	17,316,052,630	468,373,066	97.37
	Belanja Langsung	36,418,009,333	34,065,424,599	2,352,584,733	93.54
	Belanja Pegawai	2,250,284,800	1,836,226,400	414,058,400	81.60
	Belanja Barang dan Jasa	23,164,254,832	21,189,029,092	1,975,225,739	91.47
	Belanja Modal	11,003,469,701	11,040,169,107	(36,699,406)	100.33
5	DINAS PU PROVINSI JAMBI	844,078,715,041	748,101,895,722	95,976,819,319	88.63
	Belanja Tidak Langsung	23,303,514,486	22,831,113,055	472,401,431	97.97
	Belanja Pegawai	23,303,514,486	22,831,113,055	472,401,431	97.97
	Belanja Langsung	820,775,200,555	725,270,782,667	95,504,417,888	88.36
	Belanja Pegawai	6,866,262,000	6,353,793,000	512,469,000	92.54
	Belanja Barang dan Jasa	175,389,752,550	144,935,477,356	30,454,275,194	82.64
	Belanja Modal	638,519,186,005	573,981,512,311	64,537,673,694	89.89
6	BAPPEDA	20,009,123,629	18,829,777,772	1,179,345,857	94.11
	Belanja Tidak Langsung	7,750,579,652	7,395,528,320	355,051,332	95.42
	Belanja Pegawai	7,750,579,652	7,395,528,320	355,051,332	95.42
	Belanja Langsung	12,258,543,977	11,434,249,452	824,294,525	93.28
	Belanja Pegawai	837,622,000	752,036,000	85,586,000	89.78
	Belanja Barang dan Jasa	10,707,441,977	10,017,302,634	690,139,343	93.55
	Belanja Modal	713,480,000	664,910,818	48,569,182	93.19
7	DINAS PERHUBUNGAN	56,338,497,758	44,020,223,067	12,318,274,691	78.14
	Belanja Tidak Langsung	12,419,248,758	11,974,554,078	444,694,680	96.42
	Belanja Pegawai	12,419,248,758	11,974,554,078	444,694,680	96.42
	Belanja Langsung	43,919,249,000	32,045,668,989	11,873,580,011	72.96
	Belanja Pegawai	1,347,766,000	1,098,790,000	248,976,000	81.53
	Belanja Barang dan Jasa	10,946,259,000	9,275,797,869	1,670,461,131	84.74
	Belanja Modal	31,625,224,000	21,671,081,120	9,954,142,880	68.52
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	15,595,905,743	14,789,840,833	806,064,910	94.83
	Belanja Tidak Langsung	6,137,116,543	5,759,420,627	377,695,916	93.85
	Belanja Pegawai	6,137,116,543	5,759,420,627	377,695,916	93.85

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
	Belanja Langsung	9,458,789,200	9,030,420,206	428,368,994	95.47
	Belanja Pegawai	389,551,000	385,084,550	4,466,450	98.85
	Belanja Barang dan Jasa	4,642,118,950	4,417,295,906	224,823,044	95.16
	Belanja Modal	4,427,119,250	4,228,039,750	199,079,500	95.50
9	BPMPP DAN KB	16,001,185,295	15,308,294,295	692,891,000	95.67
	Belanja Tidak Langsung	5,605,195,695	5,455,685,201	149,510,494	97.33
	Belanja Pegawai	5,605,195,695	5,455,685,201	149,510,494	97.33
	Belanja Langsung	10,395,989,600	9,852,609,094	543,380,506	94.77
	Belanja Pegawai	626,045,000	589,678,400	36,366,600	94.19
	Belanja Barang dan Jasa	9,699,356,600	9,194,194,694	505,161,906	94.79
	Belanja Modal	70,588,000	68,736,000	1,852,000	97.38
10	BADAN PENANGGULANGAN				
	BENCANA	7,836,618,533	7,143,093,883	693,524,650	91.15
	Belanja Tidak Langsung	3,600,529,872	3,387,044,545	213,485,327	94.07
	Belanja Pegawai	3,600,529,872	3,387,044,545	213,485,327	94.07
	Belanja Langsung	4,236,088,661	3,756,049,338	480,039,323	88.67
	Belanja Pegawai	565,363,000	556,797,000	8,566,000	98.48
	Belanja Barang dan Jasa	2,030,959,500	1,644,246,338	386,713,162	80.96
	Belanja Modal	1,639,766,161	1,555,006,000	84,760,161	94.83
11	DINAS SOSNAKERTRANS	47,251,622,721	43,104,653,779	4,146,968,942	91.22
	Belanja Tidak Langsung	21,470,622,721	21,136,935,936	333,686,785	98.45
	Belanja Pegawai	21,470,622,721	21,136,935,936	333,686,785	98.45
	Belanja Langsung	25,781,000,000	21,967,717,843	3,813,282,157	85.21
	Belanja Pegawai	1,460,824,400	1,360,318,150	100,506,250	93.12
	Belanja Barang dan Jasa	21,445,473,950	17,648,943,733	3,796,530,217	82.30
	Belanja Modal	2,874,701,650	2,958,455,960	(83,754,310)	102.91
12	DINAS KOPERASI DAN UMKM	18,680,138,338	16,679,897,990	2,000,240,348	89.29
	Belanja Tidak Langsung	6,187,212,988	5,884,126,667	303,086,321	95.10
	Belanja Pegawai	6,187,212,988	5,884,126,667	303,086,321	95.10
	Belanja Langsung	12,492,925,350	10,795,771,323	1,697,154,027	86.42
	Belanja Pegawai	324,004,000	306,348,100	17,655,900	94.55
	Belanja Barang dan Jasa	9,613,962,550	8,240,889,723	1,373,072,827	85.72
	Belanja Modal	2,554,958,800	2,248,533,500	306,425,300	88.01
13	BKPMMD DAN PPT	10,058,885,365	9,672,815,374	386,069,991	96.16
	Belanja Tidak Langsung	4,738,320,365	4,601,241,364	137,079,001	97.11
	Belanja Pegawai	4,738,320,365	4,601,241,364	137,079,001	97.11
	Belanja Langsung	5,320,565,000	5,071,574,010	248,990,990	95.32
	Belanja Pegawai	539,236,500	531,044,500	8,192,000	98.48
	Belanja Barang dan Jasa	4,442,898,500	4,146,031,786	296,866,714	93.32
	Belanja Modal	338,430,000	394,497,724	(56,067,724)	116.57
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	31,576,773,544	29,076,098,668	2,500,674,876	92.08
	Belanja Tidak Langsung	11,723,135,644	11,249,290,883	473,844,761	95.96
	Belanja Pegawai	11,723,135,644	11,249,290,883	473,844,761	95.96

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
	Belanja Langsung	19,853,637,900	17,826,807,785	2,026,830,115	89.79
	Belanja Pegawai	1,095,779,000	1,012,784,500	82,994,500	92.43
	Belanja Barang dan Jasa	16,055,926,900	14,308,875,285	1,747,051,615	89.12
	Belanja Modal	2,701,932,000	2,505,148,000	196,784,000	92.72
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Belanja Tidak Langsung	32,646,642,280	30,229,131,317	2,417,510,963	92.59
	Belanja Pegawai	7,526,786,816	7,055,194,699	471,592,117	93.73
	Belanja Langsung	7,526,786,816	7,055,194,699	471,592,117	93.73
	Belanja Pegawai	25,119,855,464	23,173,936,618	1,945,918,846	92.25
	Belanja Pegawai	4,149,943,000	3,899,224,900	250,718,100	93.96
	Belanja Barang dan Jasa	17,537,788,600	15,938,710,718	1,599,077,882	90.88
	Belanja Modal	3,432,123,864	3,336,001,000	96,122,864	97.20
16	SATPOL PP	22,125,963,550	19,786,194,599	2,339,768,951	89.43
	Belanja Tidak Langsung	12,809,688,550	11,319,526,156	1,490,162,394	88.37
	Belanja Pegawai	12,809,688,550	11,319,526,156	1,490,162,394	88.37
	Belanja Langsung	9,316,275,000	8,466,668,443	849,606,557	90.88
	Belanja Pegawai	2,029,737,900	1,973,073,900	56,664,000	97.21
	Belanja Barang dan Jasa	5,653,679,100	4,951,800,743	701,878,357	87.59
	Belanja Modal	1,632,858,000	1,541,793,800	91,064,200	94.42
17	KESBANGPOL	12,582,474,995	12,232,323,318	350,151,677	97.22
	Belanja Tidak Langsung	3,901,473,995	3,803,714,308	97,759,687	97.49
	Belanja Pegawai	3,901,473,995	3,803,714,308	97,759,687	97.49
	Belanja Langsung	8,681,001,000	8,428,609,010	252,391,990	97.09
	Belanja Pegawai	542,031,000	517,762,000	24,269,000	95.52
	Belanja Barang dan Jasa	7,126,030,050	6,933,745,010	192,285,040	97.30
	Belanja Modal	1,012,939,950	977,102,000	35,837,950	96.46
18	DPDR PROVINSI JAMBI	13,649,835,150	13,173,601,283	476,233,867	96.51
	Belanja Tidak Langsung	13,649,835,150	13,173,601,283	476,233,867	96.51
	Belanja Pegawai	13,649,835,150	13,173,601,283	476,233,867	96.51
	Belanja Langsung	-	-	-	-
	Belanja Pegawai	-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-	-
19	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KDH	1,746,854,526	1,573,861,683	172,992,843	90.10
	Belanja Tidak Langsung	1,746,854,526	1,573,861,683	172,992,843	90.10
	Belanja Pegawai	1,746,854,526	1,573,861,683	172,992,843	90.10
	Belanja Langsung	-	-	-	-
	Belanja Pegawai	-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-	-
20	SEKRETARIAT DAERAH	139,085,977,957	126,050,583,839	13,035,394,118	90.63
	Belanja Tidak Langsung	43,930,249,357	43,339,777,931	590,471,426	98.66
	Belanja Pegawai	43,930,249,357	43,339,777,931	590,471,426	98.66
	Belanja Langsung	95,155,728,600	82,710,805,908	12,444,922,692	86.92
	Belanja Pegawai	8,899,769,700	7,758,239,300	1,141,530,400	87.17
	Belanja Barang dan Jasa	78,858,628,650	67,878,219,558	10,980,409,092	86.08
	Belanja Modal	7,397,330,250	7,074,347,050	322,983,200	95.63

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
21	SEKRETARIAT DPRD	54,301,606,792	41,541,605,369	12,760,001,423	76.50
	Belanja Tidak Langsung	6,301,606,792	5,552,468,914	749,137,878	88.11
	Belanja Pegawai	6,301,606,792	5,552,468,914	749,137,878	88.11
	Belanja Langsung	48,000,000,000	35,989,136,455	12,010,863,545	74.98
	Belanja Pegawai	490,040,400	389,458,400	100,582,000	79.47
	Belanja Barang dan Jasa	42,443,948,450	30,665,511,869	11,778,436,581	72.25
	Belanja Modal	5,066,011,150	4,934,166,186	131,844,964	97.40
22	BADAN PENGELOLA				
	KEUANGAN DAN ASET	57,900,728,323	32,485,487,285	25,415,241,038	56.11
	Belanja Tidak Langsung	33,979,069,173	11,225,738,431	22,753,330,742	33.04
	Belanja Pegawai	33,979,069,173	11,225,738,431	22,753,330,742	33.04
	Belanja Langsung	23,921,659,150	21,259,748,854	2,661,910,296	88.87
	Belanja Pegawai	2,838,285,000	2,455,662,500	382,622,500	86.52
	Belanja Barang dan Jasa	14,356,129,024	12,865,789,345	1,490,339,679	89.62
	Belanja Modal	6,727,245,126	5,938,297,009	788,948,117	88.27
23	BALITBANGDA	10,072,384,164	9,513,893,656	558,490,508	94.46
	Belanja Tidak Langsung	4,848,413,071	4,665,772,249	182,640,822	96.23
	Belanja Pegawai	4,848,413,071	4,665,772,249	182,640,822	96.23
	Belanja Langsung	5,223,971,093	4,848,121,407	375,849,686	92.81
	Belanja Pegawai	835,818,500	779,818,000	56,000,500	93.30
	Belanja Barang dan Jasa	3,987,334,593	3,702,976,743	284,357,850	92.87
	Belanja Modal	400,818,000	365,326,664	35,491,336	91.15
24	INSPEKTORAT PROVINSI				
	JAMBI	19,061,126,501	18,173,350,952	887,775,549	95.34
	Belanja Tidak Langsung	6,976,298,501	6,848,525,818	127,772,683	98.17
	Belanja Pegawai	6,976,298,501	6,848,525,818	127,772,683	98.17
	Belanja Langsung	12,084,828,000	11,324,825,134	760,002,866	93.71
	Belanja Pegawai	496,766,400	439,745,300	57,021,100	88.52
	Belanja Barang dan Jasa	8,486,561,600	7,906,571,834	579,989,766	93.17
	Belanja Modal	3,101,500,000	2,978,508,000	122,992,000	96.03
25	KANTOR PERWAKILAN				
	PROVINSI JAMBI	15,970,479,515	15,330,619,802	639,859,713	95.99
	Belanja Tidak Langsung	4,570,479,515	4,474,181,421	96,298,094	97.89
	Belanja Pegawai	4,570,479,515	4,474,181,421	96,298,094	97.89
	Belanja Langsung	11,400,000,000	10,856,438,381	543,561,619	95.23
	Belanja Pegawai	771,504,900	762,252,900	9,252,000	98.80
	Belanja Barang dan Jasa	9,373,544,400	8,945,166,251	428,378,149	95.43
	Belanja Modal	1,254,950,700	1,149,019,230	105,931,470	91.56
26	DIPENDA PROVINSI JAMBI	61,667,385,213	42,483,432,751	19,183,952,462	68.89
	Belanja Tidak Langsung	42,771,547,463	25,641,363,895	17,130,183,568	59.95
	Belanja Pegawai	42,771,547,463	25,641,363,895	17,130,183,568	59.95
	Belanja Langsung	18,895,837,750	16,842,068,856	2,053,768,894	89.13
	Belanja Pegawai	2,285,659,400	2,188,747,400	96,912,000	95.76
	Belanja Barang dan Jasa	13,158,228,350	11,289,609,137	1,868,619,213	85.80
	Belanja Modal	3,451,950,000	3,363,712,319	88,237,681	97.44

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
27	SEKRETARIAT KORPRI	5,396,141,765	5,167,961,849	228,179,916	95.77
	Belanja Tidak Langsung	2,122,929,895	2,055,314,607	67,615,288	96.82
	Belanja Pegawai	2,122,929,895	2,055,314,607	67,615,288	96.82
	Belanja Langsung	3,273,211,870	3,112,647,242	160,564,628	95.09
	Belanja Pegawai	457,303,000	423,799,500	33,503,500	92.67
	Belanja Barang dan Jasa	2,231,623,620	2,109,057,742	122,565,878	94.51
	Belanja Modal	584,285,250	579,790,000	4,495,250	99.23
28	BIRO KEUANGAN DAN				
	ASET (SKPKD)	1,117,610,242,948	1,007,769,767,756	109,840,475,192	90.17
	Belanja Tidak Langsung	1,117,610,242,948	1,007,769,767,756	109,840,475,192	90.17
	Belanja Pegawai	-	-	-	-
	Belanja Langsung	-	-	-	-
	Belanja Pegawai	-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-	-
29	BADAN DIKLAT	18,679,505,181	16,947,371,612	1,732,133,569	90.73
	Belanja Tidak Langsung	6,513,995,521	6,127,557,692	386,437,829	94.07
	Belanja Pegawai	6,513,995,521	6,127,557,692	386,437,829	94.07
	Belanja Langsung	12,165,509,660	10,819,813,920	1,345,695,740	88.94
	Belanja Pegawai	311,480,900	251,941,500	59,539,400	80.89
	Belanja Barang dan Jasa	7,345,063,400	6,244,571,040	1,100,492,360	85.02
	Belanja Modal	4,508,965,360	4,323,301,380	185,663,980	95.88
30	BADAN KEPEGAWAIAN				
	DAERAH	16,840,628,835	12,804,865,211	4,035,763,624	76.04
	Belanja Tidak Langsung	12,156,514,835	8,571,241,453	3,585,273,382	70.51
	Belanja Pegawai	12,156,514,835	8,571,241,453	3,585,273,382	70.51
	Belanja Langsung	4,684,114,000	4,233,623,758	450,490,242	90.38
	Belanja Pegawai	615,968,500	597,586,500	18,382,000	97.02
	Belanja Barang dan Jasa	3,703,958,500	3,276,526,258	427,432,242	88.46
	Belanja Modal	364,187,000	359,511,000	4,676,000	98.72
31	KPID	5,305,514,524	4,595,518,324	709,996,200	86.62
	Belanja Tidak Langsung	1,646,514,524	1,550,621,692	95,892,832	94.18
	Belanja Pegawai	1,646,514,524	1,550,621,692	95,892,832	94.18
	Belanja Langsung	3,659,000,000	3,044,896,632	614,103,368	83.22
	Belanja Pegawai	777,037,000	706,249,500	70,787,500	90.89
	Belanja Barang dan Jasa	2,805,352,300	2,269,632,462	535,719,838	80.90
	Belanja Modal	76,610,700	69,014,670	7,596,030	90.08
32	KANTOR PDE/DINAS				
	KOMINFO	14,552,497,511	13,575,226,652	977,270,859	93.28
	Belanja Tidak Langsung	2,699,633,511	2,273,191,538	426,441,973	84.20
	Belanja Pegawai	2,699,633,511	2,273,191,538	426,441,973	84.20
	Belanja Langsung	11,852,864,000	11,302,035,114	550,828,886	95.35
	Belanja Pegawai	670,470,000	658,061,500	12,408,500	98.15
	Belanja Barang dan Jasa	7,087,475,300	6,679,819,964	407,655,336	94.25
	Belanja Modal	4,094,918,700	3,964,153,650	130,765,050	96.81

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
33	BADAN PERPUSTAKAAN				
	DAN ARSIP	17,149,065,836	16,393,195,703	755,870,133	95.59
	Belanja Tidak Langsung	8,164,751,774	7,843,092,656	321,659,118	96.06
	Belanja Pegawai	8,164,751,774	7,843,092,656	321,659,118	96.06
	Belanja Langsung	8,984,314,062	8,550,103,047	434,211,015	95.17
	Belanja Pegawai	562,762,000	545,492,750	17,269,250	96.93
	Belanja Barang dan Jasa	4,866,016,312	4,646,141,197	219,875,115	95.48
	Belanja Modal	3,555,535,750	3,358,469,100	197,066,650	94.46
34	BADAN KETAHANAN				
	PANGAN	11,680,299,736	11,060,042,327	620,257,409	94.69
	Belanja Tidak Langsung	5,892,924,736	5,564,131,715	328,793,021	94.42
	Belanja Pegawai	5,892,924,736	5,564,131,715	328,793,021	94.42
	Belanja Langsung	5,787,375,000	5,495,910,612	291,464,388	94.96
	Belanja Pegawai	642,771,000	626,830,200	15,940,800	97.52
	Belanja Barang dan Jasa	5,049,156,800	4,776,087,139	273,069,661	94.59
	Belanja Modal	95,447,200	92,993,273	2,453,927	97.43
35	BAKORLUH/SEKRETARIAT				
	BAKORLUH	11,862,885,879	11,383,723,039	479,162,840	95.96
	Belanja Tidak Langsung	5,490,739,629	5,255,860,075	234,879,554	95.72
	Belanja Pegawai	5,490,739,629	5,255,860,075	234,879,554	95.72
	Belanja Langsung	6,372,146,250	6,127,862,964	244,283,286	96.17
	Belanja Pegawai	816,917,000	802,199,500	14,717,500	98.20
	Belanja Barang dan Jasa	5,017,797,500	4,775,715,864	242,081,636	95.18
	Belanja Modal	537,431,750	549,947,600	(12,515,850)	102.33
36	DINAS PERTANIAN				
	TANAMAN PANGAN	48,339,365,280	45,980,666,602	2,358,698,678	95.12
	Belanja Tidak Langsung	20,613,058,403	20,098,470,656	514,587,747	97.50
	Belanja Pegawai	20,613,058,403	20,098,470,656	514,587,747	97.50
	Belanja Langsung	27,726,306,877	25,882,195,946	1,844,110,931	93.35
	Belanja Pegawai	1,572,066,400	1,498,766,400	73,300,000	95.34
	Belanja Barang dan Jasa	18,843,021,927	17,614,061,946	1,228,959,981	93.48
	Belanja Modal	7,311,218,550	6,769,367,600	541,850,950	92.59
37	DINAS PERKEBUNAN	56,176,236,263	52,757,286,696	3,418,949,567	93.91
	Belanja Tidak Langsung	9,858,850,659	9,593,611,326	265,239,333	97.31
	Belanja Pegawai	9,858,850,659	9,593,611,326	265,239,333	97.31
	Belanja Langsung	46,317,385,604	43,163,675,370	3,153,710,234	93.19
	Belanja Pegawai	438,112,400	427,791,900	10,320,500	97.64
	Belanja Barang dan Jasa	42,256,585,744	39,315,276,440	2,941,309,304	93.04
	Belanja Modal	3,622,687,460	3,420,607,030	202,080,430	94.42
38	DINAS PETERNAKAN DAN				
	KESWAN	38,333,866,057	32,568,328,914	5,765,537,143	84.96
	Belanja Tidak Langsung	8,345,641,330	7,580,229,839	765,411,491	90.83
	Belanja Pegawai	8,345,641,330	7,580,229,839	765,411,491	90.83
	Belanja Langsung	29,988,224,727	24,988,099,075	5,000,125,652	83.33
	Belanja Pegawai	1,956,410,000	1,907,808,500	48,601,500	97.52
	Belanja Barang dan Jasa	16,886,770,227	13,547,819,075	3,338,951,152	80.23
	Belanja Modal	11,145,044,500	9,532,471,500	1,612,573,000	85.53

No	SKPD/ Jenis Belanja	2014*			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
39	DINAS KEHUTANAN	23,765,165,094	21,774,829,672	1,990,335,422	91.62
	Belanja Tidak Langsung	11,682,760,494	10,687,960,438	994,800,056	91.48
	Belanja Pegawai	11,682,760,494	10,687,960,438	994,800,056	91.48
	Belanja Langsung	12,082,404,600	11,086,869,234	995,535,366	91.76
	Belanja Pegawai	677,820,400	653,461,400	24,359,000	96.41
	Belanja Barang dan Jasa	8,955,902,200	8,265,767,748	690,134,452	92.29
	Belanja Modal	2,448,682,000	2,167,640,086	281,041,914	88.52
40	DINAS ESDM	14,777,637,557	10,669,730,583	4,107,906,974	72.20
	Belanja Tidak Langsung	4,381,360,807	4,179,225,633	202,135,174	95.39
	Belanja Pegawai	4,381,360,807	4,179,225,633	202,135,174	95.39
	Belanja Langsung	10,396,276,750	6,490,504,950	3,905,771,800	62.43
	Belanja Pegawai	389,651,400	333,208,850	56,442,550	85.51
	Belanja Barang dan Jasa	9,090,810,350	5,703,940,900	3,386,869,450	62.74
	Belanja Modal	915,815,000	453,355,200	462,459,800	49.50
41	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	47,945,010,977	46,090,462,067	1,854,548,910	96.13
	Belanja Tidak Langsung	10,730,173,607	10,311,577,918	418,595,689	96.10
	Belanja Pegawai	10,730,173,607	10,311,577,918	418,595,689	96.10
	Belanja Langsung	37,214,837,370	35,778,884,149	1,435,953,221	96.14
	Belanja Pegawai	2,314,696,400	2,305,164,900	9,531,500	99.59
	Belanja Barang dan Jasa	25,532,698,470	24,454,202,449	1,078,496,021	95.78
	Belanja Modal	9,367,442,500	9,019,516,800	347,925,700	96.29
42	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22,761,019,431	21,502,674,579	1,258,344,852	94.47
	Belanja Tidak Langsung	10,987,803,931	10,661,821,765	325,982,166	97.03
	Belanja Pegawai	10,987,803,931	10,661,821,765	325,982,166	97.03
	Belanja Langsung	11,773,215,500	10,840,852,814	932,362,686	92.08
	Belanja Pegawai	733,508,400	703,108,400	30,400,000	95.86
	Belanja Barang dan Jasa	8,028,062,600	7,296,840,914	731,221,686	90.89
	Belanja Modal	3,011,644,500	2,840,903,500	170,741,000	94.33
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1,664,278,849,417	1,488,053,977,175	176,224,872,242	89.41
	Jumlah Belanja Langsung	1,976,956,404,281	1,724,324,560,185	252,631,844,096	87.22
	Belanja Pegawai	110,989,106,881	90,004,993,272	20,984,113,609	81.09
	Belanja Barang dan Jasa	946,667,746,830	813,303,968,502	133,363,778,328	85.91
	Belanja Modal	919,299,550,569	821,015,598,410	98,283,952,159	89.31
	Jumlah Belanja	3,641,235,253,698	3,212,378,537,360	428,856,716,339	88.22

Sumber : BPKAD Prov. Jambi

Ket.: *) Data Sementara, 31 Januari 2015